

Judul : Konsumsi susu rendah, legislator dorong peran aktif swasta
Tanggal : Minggu, 08 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Konsumsi Susu Rendah Legislator Dorong Peran Aktif Swasta

ANGGOTA Komisi VII DPR Putra Nababan menyoroti rendahnya konsumsi susu di kalangan anak-anak Indonesia. Kondisi itu berdampak langsung pada kualitas gizi generasi muda dan tidak sejalan dengan komitmen mendorong peningkatan kesehatan dan pembangunan SDM.

Rendahnya konsumsi susu mencerminkan lemahnya sistem distribusi, edukasi gizi, dan keterjangkauan harga bagi masyarakat. "Setiap hari ada loss. Anak-anak kita, nggak tahu anaknya siapa, ini pasti anaknya seseorang yang tidak minum susu," ujar Putra dalam keterangannya, Jumat (6/2/2026).

Dia menambahkan, pemenuhan gizi anak tidak boleh dipandang sebagai beban tunggal negara, tapi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Tanpa keterlibatan aktif swasta, upaya meningkatkan kualitas generasi muda hanya akan menjadi slogan kebijakan.

"Negara memang bertanggung jawab, tapi swasta juga harus ikut membantu. Karena dari faktanya, ada 30 sekian juta anak kita yang tidak minum susu," tegasnya.

Menurutnya, pendekatan berbasis statistik semata justru berpotensi menutupi persoalan riil di lapangan. Kebijakan yang hanya mendorong konsumsi susu satu hingga dua kali seminggu tidak mencerminkan kebutuhan gizi anak secara ideal.

"Padahal Presiden minta minum susu. Lalu kita justifikasi seminggu dua kali supaya statistiknya bagus. Itu namanya statistik bohong. Faktanya, mereka

tidak minum susu," katanya.

Putra menambahkan, Kementerian Perindustrian belum berperan optimal dalam mengkoordinasikan kontribusi sektor swasta. Seharusnya, ada target yang jelas dan terukur agar peningkatan konsumsi susu tidak berhenti pada wacana.

"Tanggung jawab Pemerintah adalah mengumpulkan swasta. Karena di tengah kecanggihan produksi industri susu, masih ada jutaan anak-anak yang tidak bisa minum susu," ungkapnya.

Politikus PDIP itu menyebut, pembangunan industri pangan berbasis gizi harus dilandasi empati sosial, bukan semata pertimbangan bisnis. Kemajuan teknologi produksi tidak boleh mengabaikan realitas masih banyaknya anak yang kekurangan asupan nutrisi dasar.

Senada, Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia Chalim mengungkapkan, masih ada kesenjangan yang lebar antara kebutuhan dan produksi susu nasional. Kondisi itu mencerminkan tantangan struktural sekaligus peluang strategis bagi penguatan industri susu dalam negeri.

"Permintaan dengan produksinya masih ada gap tinggi. Sisi lain juga ada tantangan raw material ini diproduksi dan tempat produksinya itu," ujar Chusnunia.

Data menunjukkan, rata-rata konsumsi susu masyarakat Indonesia baru mencapai sekitar 16,6 liter per kapita per tahun, jauh di bawah standar FAO sebesar 30 liter. Angka itu tertinggal dibandingkan Malaysia, Singapura, dan Vietnam. ■ PYB